

## RINGKASAN

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penerapan mekanisme ganda dalam penarikan jasa parkir di Kabupaten Banyumas, yaitu melalui pajak parkir sebagai bagian dari Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) dan retribusi parkir sebagai Retribusi Jasa Umum. Mekanisme ganda tersebut berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara Bapenda dan Dishub, ketidakpastian hukum, serta belum optimalnya pencapaian target pendapatan jasa parkir. Penelitian ini berfokus pada dua permasalahan, yaitu dampak pengaturan mekanisme ganda terhadap optimalisasi pendapatan jasa parkir di Kabupaten Banyumas dan konstruksi Peraturan Daerah mengenai penarikan jasa parkir. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak pengaturan tersebut serta menentukan arah konstruksi pengaturan yang lebih efektif dan selaras dengan prinsip negara hukum dan otonomi daerah.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif-analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan norma hukum, mengkaji konsistensi hierarki peraturan perundang-undangan, serta menilai kesesuaian pengaturan daerah dengan prinsip legalitas, kepastian hukum, dan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mekanisme ganda dalam penarikan jasa parkir di Kabupaten Banyumas menimbulkan fragmentasi kewenangan, ketidakterpaduan sistem pendataan dan pengawasan, serta hambatan dalam optimalisasi PAD. Pengaturan antara pajak dan retribusi parkir belum sepenuhnya didukung oleh pengaturan teknis yang jelas mengenai klasifikasi objek dan tata cara pemungutan. Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya kontribusi jasa parkir terhadap PAD. Perlu konstruksi Peraturan Daerah yang menegaskan batasan objek pajak dan retribusi, memperkuat koordinasi antar organisasi perangkat daerah, serta menyelaraskan pengaturan guna mewujudkan kepastian hukum dan optimalisasi pendapatan jasa parkir sebagai bagian dari PAD.

## SUMMARY

*This research is motivated by the implementation of a dual mechanism in the collection of parking service charges in Banyumas Regency, namely through parking tax as part of the Specific Goods and Services Tax (PBJT) and parking retribution as a Public Service Retribution. This dual mechanism has the potential to create overlapping authority between the Regional Revenue Agency and the Department of Transportation, legal uncertainty, and suboptimal achievement of parking revenue targets. This study focuses on two issues: the impact of regulating the dual mechanism on the optimization of parking service revenue in Banyumas Regency and the reconstruction of Regional Regulations concerning the collection of parking service charges. The objective of this research is to analyse the impact of such regulatory arrangements and to formulate a more effective regulatory reconstruction aligned with the principles of the rule of law and regional autonomy.*

*This study employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. The research specification is descriptive-analytical in nature. The data used are secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials obtained through library research. Data analysis is conducted qualitatively by interpreting legal norms, examining the consistency of the hierarchy of laws and regulations, and assessing the conformity of regional regulations with the principles of legality, legal certainty, and the effectiveness of regional revenue management.*

*The findings indicate that the regulation of the dual mechanism in the collection of parking service charges in Banyumas Regency results in fragmented authority, a lack of integration in data collection and supervisory systems, and obstacles to the optimization of Local Own-Source Revenue (PAD). The regulatory framework governing parking tax and parking retribution is not yet fully supported by clear technical provisions regarding object classification and collection procedures. This condition affects the suboptimal contribution of parking services to PAD. Therefore, a reconstruction of the Regional Regulation is necessary to clarify the boundaries between tax and retribution objects, strengthen coordination among regional government agencies, and harmonize regulatory arrangements in order to achieve legal certainty and optimize parking service revenue as part of PAD.*